

**PENGARUH *PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,*
KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi empiris pada SKPD Kota Solok)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

REZA ILHAM PUTRA

2016/16043113

Dosen Pembimbing :
HALMAWATI, SE, M. Si

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)

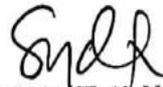
Nama : Reza Ilham Putra
NIM / TM : 16043113 / 2016
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 9 November 2021

Disetujui Oleh:

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Dosen Pembimbing



Halmawati, SE, M. Si
NIP. 19740303 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Solok)
Nama : Reza Ilham Putra
NIM / TM : 16043113 / 2016
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 9 November 2021

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Halmawati, SE, M. Si	1. 
2.	Anggota	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	2. 
3.	Anggota	Herlina Helmy, SE, M. SA	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Ilham Putra
NIM/Tahun masuk : 16043113/2016
Tempat/Tgl Lahir : Solok/23 Desember 1997
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumnas Nusa Indah 1, Blok A, No.4
No. Hp : 081270522010
Judul Skripsi : Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (*Studi empiris pada SKPD Kota Solok*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah aslindan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusa, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh pembimbing, Tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah dieproleh karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 9 November 2021


Reza Ilham Putra
NIM. 16043113

ABSTRAK

Reza Ilham Putra. (16043113/2016). “Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Solok)”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing : Halmawati, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 24 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok dengan jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 48 kuesioner dan masing-masing SKPD terdiri dari 2 sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel SAKD berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Halmawati SE, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis.
3. Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku dosen penelaah yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S.Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Idris, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Orang tua tersayang Asmiardi. SP dan Hasnibar. Spd.SD, kakak Amelia Aurantika. A.Md,Keb dan adik Merisa Laras Putri yang selalu memberikan motivasi, perhatian, nasihat, doa dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Kandung Akuntansi kelas D 2016 diantaranya Vega, LailaPut, Linia, Inul, Irfan, Iqbal, Isan, Ami, Mega, Ike, Putri Zainiah, Putri Rahmawati, Rahmat, Rani, Ranti, Rega, Resti, Reza Purnama, Risti, Ririn, Dio, Rizki, Vivi, Wahyu dan Zamratul yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan bantuan serta semangat kepada penulis.
11. Keluarga Kandung Akuntansi tahun masuk 2016 yag telah berjuang bersama dan memberikan bantuan serta semangat kepada penulis.
12. Abang Rizki Anshari, SE selaku admin prosi akuntansi yang telah banyak membantu penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu- persatu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitain.....	10
BAB II KAJIAN TEORI, HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL	11
2.1 Kajian teori.....	11
2.1.1 Agency Theory.....	11
2.1.2 Laporan keuangan.....	12
2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.1.4 Komitmen organisasi.....	15
2.1.5 Pengendalian <i>intern</i>	16
2.2 Penelitian terdahulu.....	17
2.3 Hubungan antar variabel.....	21
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	23
2.5 Pengukuran Definisi Operasional dan Indikator.....	24
2.6 Kerangka Konseptual.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel	28
3.4 Unit Analisis.....	29
3.5 Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	29
3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	30
3.7 Analisis Data	33
3.8 Uji Asumsi Klasik	34
3.9 Uji Hipotesis.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Deskripsi Data.....	37
4.1.2 Gambaran Umum Responden.....	39
4.1.3 Statistik Deskriptif	42
4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data.....	46
4.1.4.1 Hasil Uji Validitas	46
4.1.4.2 Hasil Uji Realibilitas.....	47
4.1.5 Hasil Uji Asumsi Dasar	47
4.1.5.1 Hasil Uji Normalitas	47
4.1.6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	48
4.1.6.1 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
4.1.6.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	49
4.2 Hasil Uji Hipotesis	49
4.3 Pembahasan.....	51
4.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	51

4.3.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	52
4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	53
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Implikasi Hasil Penelitian.....	55
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	56
5.4 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka konseptual.....	27
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Opini audit Pemerintahan Kota Solok tahun 2012 - 2020	5
Tabel 2 Perbandingan penelitian terdahulu	17
Tabel 3 Definisi operasional.....	24
Tabel 4 Distribusi penyebaran kuisisioner.....	38
Tabel 5 Tingkat pengembalian kuisisioner	39
Tabel 6 Gambaran umum responden	40
Tabel 7 Rata – rata distribusi frekuensi jawaban responden	42
Tabel 8 frekuensi jawaban responden.....	42
Tabel 9 Hasil uji validitas.....	46
Tabel 10 Hasil pengujian reabilitas	47
Tabel 11 Hasil pengujian normalitas	48
Tabel 12 Hasil pengujian multikolinearitas	48
Tabel 13 Hasil pengujian heteroskedastisitas.....	49
Tabel 14 Hasil pengujian hipotesis	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik di beberapa daerah di Indonesia pada beberapa tahun ini mengalami beberapa fenomena yang mana semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Dalam pandangan ekonomi organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Pramudiarta, 2015). Menurut PP 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Pada saat ini tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi sorotan masyarakat dikarenakan maraknya kasus korupsi di pemerintahan yang sulit diberantas ataupun kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang banyak merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah diminta keterbukaan terhadap public atas segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Penguatan akuntabilitas dan transparansi sektor public sebagai konsekuensi penting dari kebijakan pemerintah yang relevansinya dapat meningkatkan kualitas

laporan keuangan dan memperkuat pengendalian internal pada organisasi sektor public.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pengelolaan keuangan Negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat dilakukan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang diterapkan dipemerintahan. Standar akuntansi yang dimaksud yaitu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan tujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual yang dimaksud ialah, suatu sistem akuntansi dimana transaksi-transaksi ataupun peristiwa ekonomi yang diakui pencatatan dan penyajiannya, berdasarkan waktu terjadinya peristiwa ekonomi tersebut tanpa mempertimbangkan faktor waktu kas.

LKPD merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas, oleh karenanya LKPD tersebut harus berkualitas agar dapat menggambarkan kondisi dan kinerja secara akurat. LKPD dapat dikategorikan berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalam LKPD telah memenuhi karakteristik kualitatif. Ketika LKPD telah memenuhi karakteristik kualitatif, maka LKPD tersebut dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan untuk pembuatan keputusan, seperti keputusan perencanaan dan pengendalian keuangan. Karakteristik kualitatif LKPD terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yohanes Suhardjo: 2019).

Berikut merupakan uraian karakteristik kualitatif LKPD seperti berikut; *pertama* relevan, informasi yang relevan memiliki informasi yang berisikan tentang keputusan pengguna yang mempengaruhi mereka dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa yang akan datang, serta mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selanjutnya *kedua* ialah andal, keandalan informasi bergantung pada kemampuan informasi dalam menyajikan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila informasi tersebut dapat diuji kebenarannya, netral, penyajian secara wajar atau jujur (*representational faithfulness*)

Kemudian yang *ketiga* dapat dibandingkan, dapat dibandingkan ini pastinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dan yang *keempat* dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh seluruh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pada pengukuran karakteristik kualitatif LKPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan pemerintahan yang memiliki wewenang untuk pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab laporan keuangan, sebagai badan yang memiliki wewenang, terkait LKPD, BPK memiliki 4 tingkatan dalam memberikan opini terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut; *pertama*, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau *Unqualified Opinion*) dimana mempunyai

kriteria diantaranya sistem pengendalian internal memadai dan tidak salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Dengan artian secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan SAKD.

Selanjutnya *kedua*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP atau *Qualified Opinion*) dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada laporan keuangan, oleh karenanya harus memperhatikan beberapa masalah yang dilampirkan auditor. *Ketiga*, opini Tidak Memberikan Pendapat (TMT atau *Disclaimer Opinion*) opini ini mempunyai suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini oleh auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak cukup bukti dan sistem pengendalian internal yang lemah. Dalam kondisi ini auditor tidak dapat memberikan kewajaran laporan keuangan. Kemudian, opini terakhir yakni Tidak Wajar (TW atau *Adverse Opini*) opini ini muncul akibat sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat banyak salah saji pada laporan keuangan yang material, dengan demikian laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini BPK tersebut merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mendapatkan tingkat kepercayaan atas laporan keuangan yang disajikan. Opini ini juga yang akan memproksikan kualitas laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Hasil audit dengan WTP merupakan peringkat kualitas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif LKPD.

Opini audit yang berhasil didapatkan oleh pemerintah kota Kota Solok mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Semenjak tahun 2012 sampai

dengan 2020, terdapat beberapa opini audit yang pernah di sematkan BPK pada laporan keuangan mereka. Berikut data hasil audit pemerintah kota solok dari tahun 2012 sampai dengan 2020:

Tabel 1
Opini Audit Pemerintah Kota Solok Tahun 2012-2020

No	Kab/Kota	Tahun	Hasil Audit
1	Kota Solok	2012	WTP
2	Kota Solok	2013	WDP
3	Kota Solok	2014	WDP
4	Kota Solok	2015	WDP
5	Kota Solok	2016	WTP
6	Kota Solok	2017	WTP
7	Kota Solok	2018	WTP
8	Kota Solok	2019	WTP

Sumber : www.sumbar.bpk.go.id (Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa laporan keuangan kota solok mengalami penurunan kualitas. Hal ini terjadi pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Selama 3 tahun berturut-turut pemerintah kota solok mendapatkan opini Wajar Dengan Pegecualian. Setelah itu, pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan kembali dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 tahun berturut-turut dimana telah menerapkan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di tahun 2018.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pemerintah Kota Solok. Walaupun telah

mendapatkan opini WTP, namun pemerintah kota solok mendapatkan beberapa catatan penting dari BPK terkait hal yang harus diperbaiki. Hal ini tentu saja akan berdampak pada hasil audit untuk kedepannya apabila tidak ada perbaikan dari pemerintah daerah. Peneliti bermaksud untuk membuktikan apa saja determinasi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian (Winanti, 2015) menemukan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap opini audit.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik, LKPD dalam pembuatannya menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), SAKD merupakan kumpulan dari subsistem-sistem yang didalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Rujuk dalam penelitian Yuliani dan Agustini (2016) menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Selanjutnya, ditemukan bahwa komitmen organisasi merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kualitas LKPD. Rujuk dalam penelitian Rahman Arif

(2017) menemukan adanya pengaruh signifikan positif dari komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD. Dengan artian, adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relative lebih tepat. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Semakin baik komitmen pegawai dalam organisasinya maka laporan keuangan yang dibuatpun akan semakin berkualitas (Frasca Ardy Nugroho dkk, 2019)

Kemudian, untuk memberi keyakinan mengenai keteladanan laporan keuangan digunakan sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”. Peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem pengendalian internal yang ada maka akan menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.

Seperti yang telah dikemukakan, kualitas LKPD memiliki urgensi dalam pengambilan keputusan, dengan artian kualitas LKPD memiliki andil penting dan harus diperhatikan, Namun, apabila laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatife berupa, penurunan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana public (pemerintah). Investor takut menanamkan modal karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko investasi, pemberi donor mengurangi atau menghentikan bantuan, kualitas keputusan yang buruk, laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja aktual.

Berdasarkan uraian diatas, menggiring peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan masih terdapat banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan aturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggiring peneliti untuk melakukan peneltiain ini. Rujuk penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) yang menyebutkan bahwa pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Suhardjo (2019) menyebutkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena adanya perbedaan factual antara penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah, Dul Muid (2014) dengan Yohanes Suhardjo (2019), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. peneliti ingin melihat bagaimana penerapan

SAKD, Komitmen Organisasi dan Pengendalian internal memiliki pengaruh atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Solok.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Solok?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Solok?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Kota Solok. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan literature akuntansi sektor publik terutama dibidang akuntansi pemerintahan, kemudian diharapkan mampu menambah wawasan dan referensi untuk dilakukannya penelitian-penelitian berikutnya di bidang akuntansi sektor publik lainnya.

2. Manfaat bagi praktisi

Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh dan etika penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

\

BAB II
KAJIAN TEORI, HIPOTESIS, DAN
KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Kajian teori

2.1.1 Agency Theory

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2004) dalam As Syifa Nurillah (2014). Akuntabilitas public terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan AS Syifa Nurillah (2014).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk public sebagai pihak prinsipal. Pihak principal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah, kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak principal terhadap pemerintah sebagai agen. Menurut teori agensi, pemerintah memiliki akses langsung terhadap informasi dibandingkan rakyat sehingga timbul asimetri informasi. Hal ini yang terkadang dapat memicu tindakan korupsi oleh agen. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya mengurangi asimetri informasi (Agusti, 2014).

2.1.2 Laporan keuangan

2.1.2.1 Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang dihasilkan harus berlandaskan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas lainnya.

2.1.2.2 Tujuan laporan keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 dalam (Harahap, 2007) tujuan laporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan.
3. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.2.3 Komponen laporan keuangan

Dalam PP No. 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.1.2.4 Kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan yang baik berisikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan, kesalahan material dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya. Tetapi perlu diketahui juga laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan .

2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian SAKD

Menurut (Nordiawan, 2006) mengartikan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.1.3.2 Tujuan SAKD

Sistem akuntansi pemerintah (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu:

1. Pertanggung jawaban
2. Manajerial
3. Pengawasan

2.1.3.3 Ruang lingkup SAKD

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki tujuan yakni untuk menjelaskan serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi (Yohanes Suharjo, 2019)

2.1.3.4 Karakteristik SAKD

Menurut (Nordawan, 2006) SAKD atau sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Basis akuntansi
2. Sistem pembukuan

2.1.3.5 Penerapan SAKD

Berpedoman pada peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu pemerintah. Berdasarkan pernyataan diatas standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2.1.4 Komitmen organisasi

Komitmen organisasi (Rahman Arif, 2011) adalah suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Komitmen organisasi merupakan suatu dorongan di dalam individu seseorang untuk berbuat sesuatu agar dapat berperan penting dalam keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu.

Teori kepatuhan (Rahman arif, 2011) memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu komitmen normatif melalui moralitas personal, berarti mematuhi hukum tersebut sebagai kewajiban dan komitmen normatif melalui legitimasi. Dalam kepatuhan yang terpenting adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Dengan begitu adanya komitmen organisasi akan mempertahankan tanggung jawab organisasi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan SAP. Didalam pemerintahan, komitmen yang tinggi menjadikan seseorang atau individu tersebut lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan menjadikan organisasi lebih baik.

2.1.5 Pengendalian *intern*

Menurut (Yohanes Suhardjo, 2019) Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas, dan efisiensi.

Saputra (2015) dalam Yohanes Suhardjo (2019) mengatakan keterkaitan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah harus melalui proses dan tahap-tahap yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal sangat berguna jika didukung dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.2 Penelitian terdahulu

Analisis pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yaitu:

Tabel 2
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti Sekarang

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014)	Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, penerapan system akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Semua hasil pernyataan hipotesis dapat diterima, Kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Sedangkan data yang dihasilkan memenuhi asumsi klasik, dimana secara keseluruhan berarti memenuhi syarat dan dapat diterima.
2	Yusrawati dan Nina Cahyanti (2016)	Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi, terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah	Secara simultan , kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial,

		daerah	kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
3	Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017)	Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas lapoan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY.	Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Kedua, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Ketiga, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. . Keempat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
4	Emilda Ihsanti (2014)	Pengaruh kompetensi sumberaya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Kompetensi SDM dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Penerapan SAKD dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pegawai di bidang

			keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan
5	Dzulfikar Ahli Fikri (2016)	Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hipotesis kedua (H2) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas laporan keuangan SKPD Kota Malang. Hipotesis ketiga (H3) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Hipotesis keempat (H4) Berdasarkan uji regresi secara simultan, Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Malang dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil dari uji statistik pengaruh tersebut cukup besar yaitu 77% sedangkan sisanya sebesar 23% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini
6	Liza Rahayu, Kennedy, Yuneita Anisma (2014)	Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia (SDM), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah riau	Semua hasil pernyataan hipotesis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru
7	Rahman Arif (2017)	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kejelasan tujuan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah	Semua hasil pernyataan hipotesis memiliki pengaruh yang signifikan positif, Dari hasil peneltitian ini terlihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kejelasan tujuan telah baik

			dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.
8	Yohanes Suhardjo (2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9	Surya Adhitama (2017)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
10	Lailatur Rohmah, Noor Shodiq, Arista Fauzi (2020)	Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kota malang	Semua hasil pernyataan hipotesis memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pemerintah kota malang
11	Fitri Mariana Tampubolon dan Ahmad Basid (2019)	Pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan

			keuangan daerah.
--	--	--	------------------

2.3 Hubungan antar variabel

2.3.1 Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah. (Mulyadi , 2001) dalam Emilda Ihsanti (2014) mengkaitkan tujuan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan perlindungan kekayaan perusahaan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang relevan untuk pembuatan keputusan, sebaliknya apabila penerapan SAKD pada pemerintah daerah dilaksanakan dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Surya Adhitama (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Suhardjo (2019) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.3.2 Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dalam organisasi dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut, komitmen organisasi sebagai derajat dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Komitmen yang semakin tinggi terhadap organisasi akan cenderung lebih mudah dalam melakukan pekerjaan, seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam organisasi hal itu akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Tanpa adanya komitmen organisasi akan mengurangi kepedulian SDM untuk melaksanakan tugasnya dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Fitri Mariana Tampubolon dan Ahmad Basid (2019) yang meneliti tentang pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.3.3 Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk member keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang – undangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Pengawasan internal di Kabupaten/kota dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang disebut Inspektorat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatur Rohmah (2020) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini berawal dari suatu hipotesis kerja yang akan dibuktikan dalam penelitian lapangan dengan menggunakan analisis statistik. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono : 2014) dalam Fitri Mariana Tampubolon (2019) . Hipotesis ini bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam mencari sumber data yang berasal dari responden yang terdapat dalam tiap-tiap pertanyaan. Berdasarkan pemahaman kepustakaan dan penelitian terdahulu, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 :Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H2 :Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H3 :Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.5 Pengukuran Definisi Operasional dan Indikator

Operasionalisasi merupakan tahapan terakhir dalam proses pengukuran. Ini merupakan penggambaran prosedur untuk memasukkan unit-unit ke dalam kategori-kategori. Definisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Selain itu, definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Berikut akan disajikan variabel pengukuran dan indikator dalam penelitian ini.

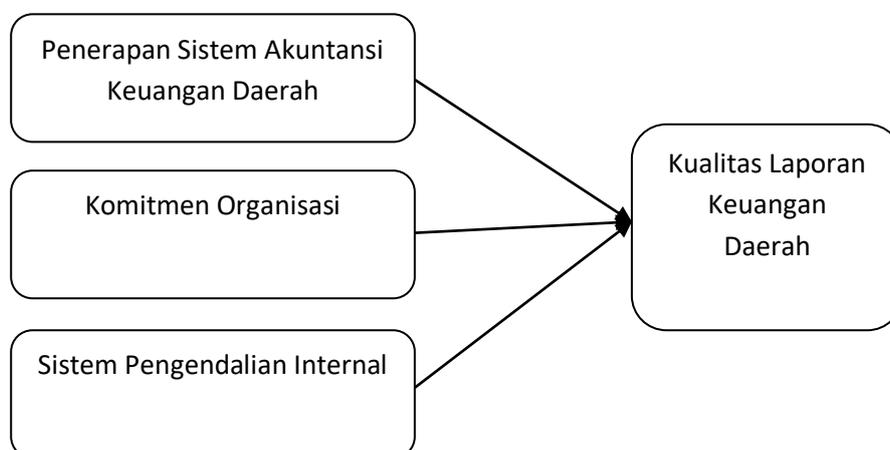
Tabel 3
Defini Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Jenis Data / Skala
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah	Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan SAP	Penerapan sistem akuntansi keuangan yang telah sesuai dengan standar yang berlaku	Ordinal
		Pengidentifikasian dan pencatatan transaksi	kemampuan menganalisis pencatatan transaksi secara benar
	Pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodic	Melakukan pencatatan secara kronologis	Ordinal
		Pencatatan transaksi didukung oleh bukti	Ordinal
		Pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi	Ordinal

Komitmen organisasi	<i>Affective Commitment</i>	Keinginan pegawai merasa ingin tetap tinggal (bekerja di lembaga atau instansi terkait).	Ordinal
		Keterkaitan emosional atau psikologis kepada organisasi	Ordinal
	<i>Normative Commitment</i>	Mempunyai kewajiban untuk tetap bekerja pada lembaga atau instansi terkait	Ordinal
		Loyalitas pada tempat bekerja	Ordinal
	<i>Continuence Commitment</i>	Keinginan untuk tetap bekerja pada lembaga atau instansi ini	Ordinal
	tidak adanya peluang untuk bekerja pada tempat lain	Ordinal	
Sistem pengendalian internal	Lingkungan pengendalian	Adanya aturan mengenai kode etik	Ordinal
		Nilai etika dan integritas	Ordinal
	Penilaian resiko	Penentuan batas dan penentuan toleransi	Ordinal
		Penerapan manajemen resiko	Ordinal
		Perubahan dalam lingkungan organisasi perusahaan	Ordinal
	Aktivitas pengendalian	Kebijakan dalam pengamanan bukti fisik atas asset	Ordinal
		Otorisasi dari pihak berwenang	Ordinal
		Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab	Ordinal
		Pengendalian akuntansi	Ordinal

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Informasi dan komunikasi	Penerapan sistem informasi	Ordinal
	Pemantauan	Pemeriksaan secara berkala	Ordinal
	Relevan	Tindak lanjut atas temuan	Ordinal
		Mempengaruhi dalam pengambilan keputusan	Ordinal
		Ketepatan waktu pelaporan	Ordinal
	Andal	Menyajikan transaksi yang jujur dan benar adanya	Ordinal
		Kesalahan material	Ordinal
		Tidak berpihak pada kebutuhan khusus (netralitas)	Ordinal
	Dapat dibandingkan	Perbandingan laporan keuangan dengan periode sebelumnya	Ordinal
		Konsistensi	Ordinal
		Berpedoman pada SAP	Ordinal
	Dapat dipahami	Mudah dimengerti secara umum	Ordinal

2.6 Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, implikasi dari penelitian ini adalah, bagi pemerintah daerah Kota Solok, hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan pertimbangan untuk SKPD Kota Solok dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dapat tercapai kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik lagi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki beberapa keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian, diantaranya:

1. Hanya ada empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga belum meneliti semua variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini menggunakan metode survey tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga kemungkinan mempengaruhi validitas hasil. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Solok sehingga untuk pemerintahan Kabupaten atau Kota lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan.

5.4 Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain untuk memprediksi pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya menambah variabel pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi dan lain sebagainya, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.
2. Setiap satuan kerja hendaknya memiliki sumberdaya yang kompeten dalam menjalankan tugas-tugas terutama dalam kompetensi sumberdaya manusia dan komitmen organisasi, karena berdasarkan hasil jawaban pada kompetensi sumberdaya manusia masih terdapat kurangnya pengetahuan (*upgrade*) responden tentang pelaporan akuntansi. Kemudian, dalam komitmen organisasi

masih banyak terdapatnya para responden yang mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan organisasi.

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah sampel yang lebih banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan menjadi kuat.